



RENJA 2025

**DINAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB II	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD	8
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	42
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	45
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025	49
	2.5. REVIEW USULAN KABUPTEN/KOTA	61
	2.6. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	65
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	67
	3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	67
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD	68
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	70
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025	72
	4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	72
	4.2. PENDANAAN	78
BAB V	PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	12
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	21
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2023	44
Tabel 2.3.1	Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat	46
Tabel 2.3.2	Permasalahan dan Isu Strategis	48
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat	51
Tabel 2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	63
Tabel 3.2.1	Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025	69
Tabel 4.1.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	74
Tabel 4.2.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	79

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah tersusun. Rencana Kerja (Renja) Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang harus dilakukan untuk mendukung perubahan-perubahan baik yang terjadi pada tingkat daerah provinsi maupun di tingkat pusat. Renja Anggaran Tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Demikian Renja Anggaran Tahun 2025 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat disusun dengan harapan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan renja tahun 2025 ini. Semoga renja anggaran ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi Pimpinan dan seluruh staf pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tahun mendatang.

Padang, Juni 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dr. ENDRIZAL, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670703 199503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan diklasifikasikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2025, proses Penyusunan Dokumen Perencanaan sudah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah dan menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan pemutakhiran dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik yang merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun. Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS serta rencana program/kegiatan/sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 mengacu pada Rancangan Renstra Tahun 2021-2026, yang merupakan tahun ke-4 (ke empat) pelaksanaan Renstra.

RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun dan menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat adalah termuat dalam BAB V Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam tabel matrik rencana program kegiatan Dinas Koperasi, UMKM yang memuat perkiraan maju rencana tahun 2026 yang terdiri dari target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
- 11) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Usaha Kecil.
- 13) Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/ 771/XII/P2EPD/Bappeda-2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 11 Desember 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud penyusunan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta indicator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan

1.4. Sistematika Penulisan

Renja 2025 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Dinas Koperasi, UKM, proses penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, keterkaitan antara

Renja Dinas Koperasi, UKM dengan Dokumen RKPD dan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan dengan Renja K/L

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Koperasi, UKM serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

2.5. Review Usulan Kabupaten/kota

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi, UKM.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

4.2 Pendanaan

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Dalam rangka mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 37.731.641.327,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 8 program, 15 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp. 30.611.798.358,- atau sebesar 81,14%.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 8.395.359.124,- dengan realisasi sebesar Rp 8.325.600.493,- atau dengan capaian sebesar 99,17 %. Untuk Belanja Barang dan Jasa, alokasi anggarannya sebesar Rp 29.071.632.403,- dengan realisasi sebesar Rp 22.062.389.865,- atau dengan capaian sebesar 75,89%. Sedangkan Belanja Modal, Dinas Koperasi, UKM mempunyai anggaran sebesar Rp. 264.649.800,- dengan realisasi Rp 223.808.000,- atau dengan capaian sebesar 84,57 %.

Dari 8 (delapan) program yang dilaksanakan pada tahun 2023, capaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12,917,518,507,- terealisasi sebesar Rp. 12.746.665.945,- atau dengan capaian sebesar 98,68%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target pada tahun 2023 sebesar 100% dan realisasi 100%. Program ini terdiri atas 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran: 1) Meningkatnya akuntabilitas

- kinerja organisasi dengan indicator Nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan target BB (73) terealisasi BB (70,74) dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indicator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target 77% tercapai 91,74%.
- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37,495,000,- terealisasi sebesar Rp. 31.127.990,- atau dengan capaian sebesar 83,02%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam, dengan target pada tahun 2023 sebesar 2,58% dan realisasi 3,5%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran: 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan indicator: a) persentase peningkatan nilai asset koperasi dengan target 4,45% terealisasi 4,61%; b) persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 2,18% terealisasi 5,12%; c) persentase koperasi RAT dengan target 66,13% terealisasi 66,13%
 - 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 343,968,650,- terealisasi sebesar Rp. 343,320,450,- atau dengan capaian sebesar 99,81%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan, dengan target pada tahun 2023 sebesar 63% dan realisasi 84,4%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran: 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan indicator: a) persentase peningkatan nilai asset koperasi dengan target 4,45% terealisasi 4,61%; b) persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 2,18% terealisasi 5,12%; c) persentase koperasi RAT dengan target 66,13% terealisasi 66,13%
 - 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 90,655,050,- terealisasi sebesar Rp. 88,376,330,- atau dengan capaian sebesar 97,49%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah koperasi sehat, dengan target pada tahun 2023 sebesar 41 koperasi dan realisasi 71 koperasi. Program ini terdiri atas 1 (kegiatan) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran: 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan indicator: a) persentase

- peningkatan nilai asset koperasi dengan target 4,45% terealisasi 4,61%; b) persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 2,18% terealisasi 5,12%; c) persentase koperasi RAT dengan target 66,13% terealisasi 66,13%
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,011,526,200,- terealisasi sebesar Rp. 1.003.698.840,- atau dengan capaian sebesar 99,23%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah SDM KUKM yang dilatih, dengan target pada tahun 2023 sebesar 1.250 KUKM dan realisasi 1.770 KUMKM. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran: 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan indikator: a) persentase peningkatan nilai asset koperasi dengan target 4,45% terealisasi 4,61%; b) persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 2,18% terealisasi 5,12%; c) persentase koperasi RAT dengan target 66,13% terealisasi 66,13%; d) jumlah UKM yang bermitra dengan target 5 UKM terealisasi 6 UKM.
- 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10,853,284,950,- terealisasi sebesar Rp. 4.175.420.901 atau dengan capaian sebesar 38,47%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah koperasi modern, dengan target pada tahun 2023 sebesar 60 koperasi dan realisasi 60 koperasi. Program ini terdiri atas 1 (kegiatan) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran: 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan indikator: a) persentase peningkatan nilai asset koperasi dengan target 4,45% terealisasi 4,61%; b) persentase peningkatan volume usaha koperasi dengan target 2,18% terealisasi 5,12%; c) persentase koperasi RAT dengan target 66,13% terealisasi 66,13%
- 7) Program Pemberdayaan UMKM, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6,226,060,920,- terealisasi sebesar Rp. 6.085.707.290 atau dengan capaian sebesar 97,75%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah produk UMKM yang terstandarisasi, dengan target pada tahun 2023 sebesar 120 UMKM dan realisasi 211 UMKM. Program ini terdiri atas 1 (kegiatan) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran:

- 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan indicator: a) jumlah UKM yang bermitra dengan taret 5 UKM terealisasi 6 UKM.
- 8) Program Pengembangan UMKM, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6,251,132,050,- terealisasi sebesar Rp. 6.137.480.612,- atau dengan capaian sebesar 98,18%. Indikator yang dicapai oleh program ini adalah persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha, dengan target pada tahun 2023 sebesar 3% dan realisasi 5,2%. Program ini terdiri atas 1 (kegiatan) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran: 1) Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan indicator: a) jumlah UKM yang bermitra dengan target 5 UKM terealisasi 6 UKM.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 berikut

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/sub kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran 2023	
				Target Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%	100	12,917,518,507	100	12,747,433,914	100	98.68
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	183,269,400	100	180,939,818	100	98.73
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2	67,198,000	2	66,043,599	100	98.28
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	dok	3	116,071,400	3	114,896,219	100	98.99
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	8,421,008,174	100	8,351,023,493	100	99.17
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	org	65	8,181,199,124	65	8,121,620,493	100	99.27
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	org	33	218,240,000	33	208,025,000	100	95.32
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang disiapkan	dok	18	21,569,050	18	21,378,000	100	99.11
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	39,100,000	100	38,942,106	100	99.60

2.17.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	unit	9	39,100,000	9	38,942,106	100	99.60
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	5,440,000	100	5,440,000	100	100.00
2.17.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek yang dilaksanakan	org	2	5,440,000	2	5,440,000	100	100.00
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	1,079,276,548	100	1,052,613,749	100	97.53
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	unit	29	36,002,300	29	35,496,000	100	98.59
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	11	47,210,800	11	43,100,000	100	91.29
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	unit	5	19,114,000	5	18,890,000	100	98.83
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit	81	310,400,500	81	300,391,000	100	96.78
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	unit	8	31,296,000	8	31,262,500	100	99.89
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	buah	10	18,640,000	10	18,445,000	100	98.95
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dok	101	616,612,948	101	605,029,249	100	98.12
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	199,415,000	100	163,035,600	100	81.76
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	unit	2	150,525,000	2	114,219,000	100	75.88
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang baru	unit		48,890,000		48,816,600	100	99.85
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	2,151,182,385	100	2,133,002,800	100	99.15
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat - surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	85	10,600,000	85	10,531,800	100	99.36
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps		439,815,000		429,609,660	100	97.68

		Jumlah rekening tagihan telpon/fax yang dibayarkan	bulan	12		12		100	
		Jumlah tagihan air yang dibayarkan	m2	4435		4435		100	
		Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	kwh	168		168		100	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia 39 orang	orang	38	1,700,767,385	38	1,692,861,340	100	99.54
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	838,827,000	100	822,436,348	100	98.05
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	33,352,000	1	33,284,000	100	99.80
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	162,800,000	10	159,894,748	100	98.22
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 44 unit	unit	44	55,540,000	44	51,925,000	100	93.49
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara 3 unit	unit	3	579,945,000	3	570,882,600	100	98.44
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	65	7,190,000	65	6,450,000	100	89.71
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi yang diterbitkan usaha simpan pinjam	%	2,58	37,495,000	2,58	31,127,990	100	83.02
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		kop	5	37,495,000	5	31,127,990	100	83.02
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	kop	5	37,495,000	5	31,127,990	100	83.02

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	%	63	343,968,650	63	343,320,450	100	99.81
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		kop	64	343,968,650	64	343,320,450	100	99.81
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Pengawasan Koperasi 64 unit	kop	64	247,946,900	64	247,353,900	100	99.76
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang menindaklanjuti hasil pengawasan	kop	60	96,021,750	60	95,966,550	100	99.94
		Jumlah pemantauan/tindakan lanjut pemeriksaan koperasi	kop					100	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	kop	41	90,655,050	41	88,376,330	100	97.49
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang kategori sehat	kop	40	90,655,050	40	88,376,330	100	97.49
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan/monev	kop	40	90,655,050	40	88,376,330	100	97.49
		Rapat koordinasi satgas pengawas prov/kab/kota	kop					100	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah KUKM yang dilatih	umkm	1250	1,011,526,200	1250	1,003,698,840	100	99.23
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi koperasi	org	450	1,011,526,200	450	1,003,698,840	100	99.23
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi gerakan koperasi	org	40	1,011,526,200	40	1,003,698,840	100	99.23
		jumlah peserta pelatihan Peningkatan Manajemen Keu Bagi Pengurus Kop	org	104		104		100	

		jumlah peserta pelatihan Penyusunan SOM, SOP dan Persus Koperasi	org	40		40		100	
		jumlah peserta pelatihan Perkoperasian Pola Syariah	org	40		40		100	
		jumlah peserta pelatihan Sertifikasi dewan syariah bagi KSPPS/USPPS Koperasi	org	44		44		100	
		jumlah peserta pelatihan simulasi RAT	org	40		40		100	
		jumlah peserta Pelatihan Teknis Akuntansi Bagi Koperasi berbasis IT	org	40		40		100	
		Monitoring dan evaluasi tenaga Pendamping dan peserta pelathan	kab/kota	18		18		100	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	kop	50	10,853,284,950	50	4,176,727,961	100	38.48
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		kop	75	10,853,284,950	75	4,176,727,961	100	38.48
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	umlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penataan manajemen	kop	94	2,843,883,450	94	2,691,725,777	100	94.65
		Terselenggaranya Hari Koperasi Tahun 2023	event	1		1		100	
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pemasaran	kop	30	8,009,401,500	30	1,485,002,184	100	18.54
		Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan manajemen usaha	kop	30		30		100	
		Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah	kop	30		30		100	
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	kop	30		30		100	
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan/permodalan	kop	30		30		100	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	umkm	120	6,226,060,920	120	6,085,707,290	100	97.75

2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	umkm	120	6,226,060,920	120	6,085,707,290	100	97.75
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	lembaga	5	1,824,146,950	5	1,745,699,760	100	95.70
		Jumlah lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	lembaga	4		4		100	
		Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan	org	400		400		100	
		Jumlah pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	org	200		200		100	
		Jumlah pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan	org	150		150		100	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi akses keuangan perbankan dan non bank melalui sosialisasi	org	640		640		100	
		Terfasilitasinya pendaftaran merk	merk	30		30		100	
		Terfasilitasinya penerbitan sertifikasi halal	sertifikat	30		30		100	
		Terlaksananya sosialisasi fasilitasi penumbuhan millennial entrepreneur	umkm	1550		1550		100	
		Terlaksananya sosialisasi pendaftaran merk dan sertifikasi halal	org	60		60		100	

2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah kewirausahaan bagi pelaku UMKM	org	100	4,401,913,970	100	4,340,007,530	100	98.59
		Jumlah Peserta pelatihan digital enterpreneur bagi generasi milenial	org	60		60		100	
		Jumlah peserta pelatihan digital marketing	org	40		40		100	
		Jumlah peserta pelatihan kreatifitas dan inovasi bagi wirausaha pemula	org	45		45		100	
		Jumlah peserta pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM	org	52		52		100	
		Jumlah peserta pelatihan manajemen pemasaran bagi UMKM	org	40		40		100	
		Jumlah peserta pelatihan motivasi dan inovasi dalam pencapaian 100 ribu enterpreneur bagi tenaga pendamping UMKM	org	104		104		100	
		Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha bagi UMKM	org	100		100		100	
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi pelaku UMKM	org	40		40		100	
		Jumlah peserta pelatihan peningkatan teknologi digital bagi UMKM	org	210		210		100	
		Jumlah peserta pelatihan penumbuhan kewirausahaan yang inovatif dalam persaingan global	org	124		124		100	
		Jumlah peserta pelatihan Sumber Daya Pelaku UMKM	org	110		110		100	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	%	3	6,251,132,050	3	6,137,480,612	100	98.18
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan	unit usaha	45	6,251,132,050	45	6,137,480,612	100	98.18
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah enterpreneur baru tercipta melalui Bimtek Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	org	353	5,943,301,050	353	5,836,499,612	100	98.20

		Jumlah enterpreneur baru tercipta melalui bimtek peningkatan kualitas kemasan, label dan paper bag	org	106		106		100		
		Jumlah enterpreneur yang fasilitasi pengembangan pemasaran produk UMKM (bazar ramadhan dan pameran)	org	104		104		100		
		Jumlah UMKM yang mendapatkan bimtek pemasaran produk UMKM secara digital	org	650		650		100		
2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang memahami literasi Hukum	org	120	307,831,000	120	300,981,000	100	97.77	
Total						37,731,641,327		30,613,873,387	100	81.14

Untuk evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 serta pengaruhnya terhadap capaian target kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2 (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berikut ini :

Tabel 2.1.2
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	13 dokumen	3	2	2	100%	2	3	53,85%
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	1	0	-	100%	-		100%
2	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	1	0	-	100%	-		100%
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	18 dokumen	1	0	-	100%	4		33,33%
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	2 dokumen	1	0	-	100%	-		100%

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	24 dokumen	4	3	3	100%	3	3	50%
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	24 dokumen	4	4	4	100%	4	4	50%
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	410 org	65	65	65	100%	65	65	48%
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	198 org	33	33	33	100%	33		50%
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPJ yang diterbitkan	654 dokumen	109	0	-	100%	2	2	50%
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	1	0	-	100%	1		50%
2	17	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laoran tindaklanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	18 dokumen	3	0	-	33,33%	1		38,89%

2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	78 dokumen	13	18	18	100%	13	3	50%
---	----	----	------	----	--	--	------------	----	----	----	------	----	---	-----

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	600%	100%	100%	100%	100%	300%	50%	
2	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun	24 dokumen	4	-	0	0,00%	1	,33,33%	
2	17	01	1.03	02	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	102 unit	17	9	9	100%	15	15	47,06%
2	17	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	8 dokumen	-	-	-	-	3	-	
						Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	16 orang	-	-	-	-	-	-	
2	17	01	1.03	05	Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (inventaris barang semesteran, tahunan dan audited)	24 dokumen	4	-	-	100%	1	45,83%	

2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	24 dokumen	4	-	-	100%	3		,37,50%
---	----	----	------	----	---	---	------------	---	---	---	------	---	--	---------

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	01	1.04		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.04	01	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPDJumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	24 dokumen	4	-	-	100%	2 dokumen		,37,50%
2	17	01	1.04	02	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah							1 kali		
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi kepegawaian	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.05	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	360 stel	75	-	-	100%	65 stel		37,5%

2	17	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	14 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	17	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4 kali	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)					
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	260 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	17	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	30 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	17	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Imlementasi peraturan Perundang-Undangan	'Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	52 orang	8	2	2	100%	3 orang	-	38,46%
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	174 jenis	24	29	29	100%	28 jenis	6	47,13%
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	120 jenis	19	11	11	100%	2 jenis	2	40,83%

2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	-	5	5	-	11 unit	2	25%
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	224 jenis	19	81	81	100%	83 jenis	11	52,23%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)					
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2	17	01	1.06	05	Penyediaan bahan cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 jenis	8	8	8	100%	7 jenis	7	50%
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 jenis	4	10	10	100%	5 jenis	5	40%
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	360 laporan	60	101	101	100%	101 dokumen	26	61,39%
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	4 unit	-	-	-	-	2 unit		-
2	17	01	1.07	03	Pengadaan Alat besar	Jumlah alat besar yang disediakan						4 unit		

2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	120 unit	11	2	2	100%	10 jenis		32,5%
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	45 unit	-	-	-	-	1 unit		37,78%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)					
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2	17	01	1.07	07	Pengadaan Asset Tetap Lainnya	Jumlah asset tetap lainnya yang diadakan	5 jenis	-	-	-	-	-	-	-
2	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya						2 unit		
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar dalam 1 tahun	6000 surat	950	85	85	100%	85 surat	22	37,25%
2	17	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	72 bln	12	-	-	100%	12 bulan	3	50%
						Jumlah rekening telepon/fax yang dibayarkan	24 000 menit	3,000	12	12	100%	2000 menit		29,36%
						Jumlah tagihan air yang dibayarkan	26.000 m3	6,495	4,435	4,435	100%	5235 m3		66,48%

						Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	3.960.000 Kwh	192,000	168	168	100%	216.94 kwh		16,29%
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	228 orang	38	38	38	100%	38 orang	3	50%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)					
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	600%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50%
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	6 unit	-	1	1	-	1 unit		16,67%
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	53 unit	11	10	10	100%	10 unit		56,60%
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	464 unit	42	44	44	100%	142 unit		59,05
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	27 unit	3	3	3	100%	2 unit		33,33%

2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab						1 unit	
---	----	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	255	0	65	65	100%	2 unit		54,90%
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	4.03	1.81	2,58	2,58	62,89	3,25%	2.58	64,02%
2	17	02	1.01		Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	90	15	-	-	100%	6 koperasi		50%
2	17	02	1.01	01	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	90	15	5	5	100%	40 orang		50%
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	69%	60%	60%	96,96%	161,6%	65%	63%	91,30%

2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	280	56	-	-	121,43%		67,14%
---	----	----	------	--	--	---	-----	----	---	---	---------	--	--------

Kode Rek					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
									Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesenambungan dan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	Jumlah pengawasan koperasi	360	56	64	64	121,43%	36 Koperasi		67,14%
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	Pembinaan tindaklanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi	360	60	60	60	110%	50 koperasi		51,67%
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	50	38	41	41	95%	43 unit	41	82%
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	98%	80%	-	95,58%	119,48%			83,67%

2	17	05	1.02	01	Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah usaha mikro kecil yang difasilitasi pelatihan	5500	907	-	-	138,62%			,52,11%
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern	90	50	50	50	100%	70 koperasi	60	66,67%
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi modern	90	50	75	75	100%	75 koperasi		66,67%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)						
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan	60	10	-	-	100%			50%	
						Jumlah koperasi yang difasilitasi konversi menjadi koperasi syariah	300	50	-	-	100%				50%
						Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penataan manajemen			94	94		75 koperasi			

						Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan kelembagaan						50 koperasi		
						Terselenggaranya Hari Koperasi Tahun 2023			1	1				
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Jumlah Koperasi baru	90	15	-	-	100%			50%
						Jumlah koperasi sector riil yang difasilitasi untuk bermitra	30	5	-	-	100%			50%
						Jumlah koperasi yang difasilitasi penataan manajemen dan penguatan usahanya	90	15	30	30	100%	30 koperasi		50%

Kode Rek	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah koperasi yang difasilitasi perluasan akses pasarnya	30	5	30	30	100%	30 koperasi		50%
		Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	60	10	30	30	100%	30 koperasi		50%
		Pembinaan kelembagaan koperasi primer dan sekunder	180	30	-	-	100%			50%
		Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah			30	30		30 koperasi		

					Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan/permodalan			30	30		30 koperasi	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	615	45	120	120	45%	34,15
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	615	45	120	120	45%	34,15

Kode Rek	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)				
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	Terfasilitasinya akses UMKM ke bank dan lembaga non bank	3240 UMKM	-	0	0	100%		
						Terfasilitasinya pendaftaran merk	215 UMKM	15	30	30	100%		32,59%
						Terfasilitasinya pendaftaran sertifikat halal	400 UMKM	30	30	30	100%		35%
						Terfasilitasinya perlindungan hukum dan konsultasi usaha bagi UKM	1500 UMKM	-	0	0	100%		37,33%

						Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan	org		400	400	100%			
						Jumlah pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	org		200	200	100%			
						Jumlah pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan	org		150	150	100%			
						Jumlah UMKM yang difasilitasi akses keuangan perbankan dan non bank melalui sosialisasi	org		640	640	100%	540 orang	270	

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil menjadi wirausaha	5%	1,2%	2%	9,31%	465,5%	3,5%	10%	200%	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Persentase usaha kecil menjadi wirausaha	5%	1,2%	2%	9,31%	465,5%		10%	200%	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	Fasilitasi perluasan pasar produk UKM Sumatera Barat	300 UMKM	8					83	27,67%	
						Terfasilitasinya pendampingan PLUT KUMKM	8.000 UMKM	-						2500	31,25%
						Terfasilitasinya UMKM mengikuti pameran produk unggulan baik dalam maupun luar Sumbar	650 UMKM	-						110	18,92%
						Terlaksananya bimtek dan sosialisasi pengembangan UMKM berbasis digital	3500 UMKM	60						768	21,94%
						Terlaksananya bimtek pengembangan desain	400 UMKM	200						308	77%

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

					dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun 2021	Target Kinerja	Realisasi Renja	Tingkat Realsasi (%)	Renja Tahun 2024	Realisasi Capaian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Jumlah enterpreneur baru tercipta melalui bimtek peningkatan kualitas kemasan, label dan paper bag		106	106	100%			
					Jumlah enterpreneur yang fasilitasi pengembangan pemasaran produk UMKM (bazar ramadhan dan pameran)		104	104	100%			
					Jumlah UMKM yang mendapatkan bimtek pemasaran produk UMKM secara digital		650	650	100%			
					Jumlah pertumbuhan wirausaha baru					2500 orang		
2	17	08	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang memahami literasi Hukum	120		100%			

Dari data tabel 2.1.2 tersebut di atas dapat dilihat :

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
 - a. Dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan 8 program (1 program penunjang urusan dan 7 program urusan) dengan 8 indikator program, 15 kegiatan dengan 15 indikator kegiatan, dan 35 sub kegiatan dengan 111 indikator keluaran.
 - b. Dari 8 program dengan 8 indikator kinerja program, sampai dengan kondisi Desember Tahun 2023 masih terdapat 1 program yang targetnya belum tercapai yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (dengan target kinerja program persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam dengan target sebesar 2,58%, terealisasi sebesar 2,22%).

Indikator kinerja program yang belum tercapai sampai dengan kondisi Desember 2023 disebabkan oleh beberapa hal :

- 1) Lemahnya koordinasi antara Dinas yang Membidangi Koperasi Kab./Kota se-Sumatera Barat dengan DPM-PTSP Kab./Kota se-Sumatera Barat
 - 2) Masih kurangnya pemahaman Personil DPM PTSP Kab/Kota terkait dengan koneksitas dengan SABH dan ODS bagi Koperasi yang melakukan pengurusan izin usaha simpan pinjam dengan Badan Hukum Non AHU
 - 3) Regulasi tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang sering berubah
 - 4) Adanya Moratorium tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, dimana Pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi sejak Akhir November 2022 sampai 3 bulan ke depan ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya.
- c. Kebijakan dan strategi yang akan dilakukan pada Tahun 2023 untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya sasaran kinerja program antara lain :

- 1) Melibatkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada Koperasi dimana PPKL tersebut bertugas tentang pengurusan izin usaha simpan pinjam koperasi.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota serta DPM-PTSP Kab./Kota dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pengurusan izin usaha simpan pinjam koperasi.
 - 3) Melakukan pendampingan bagi Koperasi yang akan mengurus izin usaha simpan pinjam melalui Sistem OSS di DPM PTSP. Dari 14 kegiatan dengan 78 sub kegiatan, masing-masing indikator kinerja tahunannya telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Kondisi Tahun 2023.
- a. Untuk pencapaian target Renstra kondisi 2023 berdasarkan table 2.1.2 diatas, Dinas Koperasi akan meningkatkan target capaian yang belum tercapai pada tahun 2023 ini.
 - b. Selain meningkatkan target capaian ditahun 2023, juga akan dilakukan revisi atas target yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sedangkan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;

- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;
- 3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selanjutnya, kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Tahun 2021-2026. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut (Tabel T-C.30) :

Tabel 2.2.1
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2023

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IK K	Target Renstra					Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2021 (Thn n-3)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-3)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)		
	Renstra 2021-2026 :														
1	Persentase peningkatan nilai asset koperasi	-	-	3,76%	4,11%	4,45%	4,80%	5,15%	3,76%	19,05%	4,61%	4,80%	5,15%	-	
2	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	-	-	1,94%	2,14%	2,18%	2,23%	2,28%	1,94%	4,90%	5,12%	2,23%	2,28%	-	
3	Persentase koperasi RAT	-	-	62,13%	64,13%	66,13%	68,13%	70,13%	62,13%	58,23%	66,13%	68,13%	70,13%	-	
4	Jumlah UKM yang bermitra	-	-	5	5	5	5	5	5	51	6	5	5	-	
5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	BB(74)	A	A	BB	BB	-	A	A	-	
6	Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	-	-	82	77	78	79	80	82	91,40	91,74	79	80	-	

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 dengan indikator kinerja:

1. Presentase peningkatan nilai asset koperasi yang diukur melalui perbandingan antara nilai asset koperasi tahun berjalan dengan nilai asset koperasi tahun lalu
2. Presentase peningkatan volume usaha koperasi yang diukur melalui perbandingan antara volume usaha koperasi tahun berjalan dengan volume usaha koperasi tahun lalu
3. Presentase koperasi RAT yang diukur melalui perbandingan antara jumlah koperasi yang telah melakukan RAT dengan jumlah koperasi secara keseluruhan.
4. Jumlah UMKM yang bermitra yang diukur melalui jumlah UMKM yang melakukan kerjasama produk dengan mitra-mitra UMKM.
5. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang diukur melalui penilaian/reviu atas laporan kinerja dinas
6. Nilai kepuasan terhadap layanan organisasi yang dihitung dari hasil survey atas layanan dinas dan UPTD terhadap Gerakan koperasi, Pembina dan pengelola koperasi serta masyarakat UMKM

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah , sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
- 3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengembangan Koperasi dan UKM di Sumatera Barat, ada beberapa permasalahan yang cukup fundamental, yaitu

Tabel 2.3.1
Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah
Pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kelembagaan koperasi yang belum memenuhi aturan perkoperasian	Pendirian koperasi baru	Koperasi dibentuk karna hanya ingin mendapatkan bantuan
		Persyaratan pendirian koperasi yang dipermudah tanpa pengawasan yang maksimal
	Koperasi masih belum melengkapi legalitas dan perijinan yang harus dimiliki	Kurangnya pengawasan terhadap koperasi
		Terbatasnya SDM pengelola koperasi dalam melengkapi kelembagaan koperasi
Pengembangan usaha koperasi yang masih rendah	Rendahnya daya saing produk koperasi	Masih rendahnya pengawasan internal koperasi yang belum melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART Koperasi
		Belum banyaknya produk koperasi sektor riil yang mengalami peningkatan nilai tambah dan mendapatkan akses pasar
		Belum optimalnya akses pembiayaan bagi koperasi
	Usaha koperasi yang berkembang hanya usaha simpan pinjam	Penerapan digitalisasi pada koperasi dalam pengembangan usaha masih terbatas
		Pengurus dan anggota koperasi kurang berinovasi dalam pengembangan usaha
Rendahnya daya saing produk UMKM	Resiko usaha simpan pinjam lebih rendah dibandingkan dengan usaha lainnya	
	Terbatasnya SDM UMKM	Masih rendahnya SDM UMKM dalam pengembangan produk
	Keterbatasan modal	Akses permodalan bagi UMKM masih terbatas

		Ketersediaan agunan bagi UMKM dalam mendapatkan permodalan
		Suku bunga pinjaman yang masih dirasakan tinggi oleh UMKM
	Keterbatasan pemasaran produk	Rendahnya penggunaan IT oleh UMKM dalam pemasaran produk
		Terbatasnya SDM UMKM dalam penggunaan teknologi untuk pemasaran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah :

1. Masih tingginya keinginan kelompok – kelompok masyarakat untuk mendirikan koperasi tidak sebanding dengan SDM pengelola koperasi dalam penataan kelembagaan dan usaha koperasi
2. Pengawasan internal dari anggota dan pengawas koperasi yang masih rendah sehingga banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT
3. Pengembangan usaha koperasi yang masih didominasi oleh usaha simpan pinjam karena rendahnya daya saing produk koperasi dan keinginan anggota untuk mengembangkan usaha koperasi
4. Rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT aktif yang disebabkan oleh kredit macet dari anggota koperasi
5. Masih terbatasnya SDM Pembina koperasi di kabupaten/kota akibat terlalu tingginya arus mutasi pada pemerintah daerah
6. Daya saing produk UMKM yang sangat rendah sehingga menyulitkan UMKM untuk naik kelas
7. Akses permodalan bagi UMKM yang masih terbatas yang disebabkan oleh suku bunga yang tinggi serta agunan yang dimiliki UMKM.

Sementara itu, terdapat peluang bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UKM, antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan bagi Koperasi dan UMKM melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan
2. Dukungan pengembangan usaha koperasi dan UMKM melalui mitra-mitra usaha sehingga produk KUMKM dapat berkembang lebih baik

3. Regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan koperasi dan UMKM baik dari segi kelembagaan, usaha dan permodalan serta pemasaran
4. Perlunya kesepakatan bersama antara Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan koperasi dan UMKM sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya Koperasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Pendirian koperasi baru	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perlunya sosialisasi aturan perkoperasian kepada kelompok-kelompok yang akan mendirikan koperasi 2) Pendampingan kepada Pra Koperasi untuk melengkapi kelengkapan pendirian koperasi sesuai aturan yang berlaku 3) Pengawasan secara periodic terhadap koperasi – koperasi yang baru berdiri
Koperasi masih belum melengkapi legalitas dan perijinan yang harus dimiliki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap koperasi terutama pengawasan terhadap kelengkapan legalitas koperasi 2. Peningkatan peran pengawas koperasi dan anggota dalam melengkapi legalitas usaha 3. Fasilitasi perijinan usaha bagi koperasi sehingga koperasi sangat bersemangat untuk melengkapi izin usahanya 4. Adanya kebijakan dan regulasi dari pembina terhadap koperasi-

Permasalahan	Isu Strategis
	koperasi yang belum memiliki kelengkapan kelembagaan dan perijinan
Rendahnya daya saing produk koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas dan inovasi produk berdampak kepada rendahnya minat masyarakat terhadap produk koperasi 2. Produk koperasi tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman 3. Pengelola koperasi lebih berminat dalam pengembangan usaha simpan pinjam
Keterbatasan pemasaran dan permodalan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan IT dalam pemasaran produk UMKM masih sangat terbatas 2. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga perbankan dan non perbankan 3. Regulasi terkait pembiayaan bagi UMKM perlu ditingkatkan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Rancangan awal RKPD Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, dengan arahan Kepala

Daerah terkait dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Setelah melalui tahapan pembahasan Renja 2025 bersama TAPD, tahapan. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada Bab IV.

Tabel 2.4.1
T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat

Kode Rek	RANCANGAN AWALRKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
2					41,501,329,000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				41,501,329,000	
2	17				41,501,329,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				41,501,329,000	
2	17	01			15,180,712,749	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	15,180,712,749	
2	17	01	1.01		261,972,700	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		100%	261,972,700	
2	17	01	1.01	01	114,522,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	6 dokumen	114,522,600	
2	17	01	1.01	06	79,166,400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	3 dokumen	79,166,400	
2	17	01	1.01	07	68,283,700	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	4 laporan	68,283,700	
2	17	01	1.02		8,750,165,419	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	8,750,165,419	
2	17	01	1.02	01	8,409,891,719	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	65 orang/bulan	8,409,891,719	

2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	2 dokumen	318,427,600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	2 dokumen	318,427,600	
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan,Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Padang	13 laporan	21,846,100	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan,Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Padang	13 laporan	21,846,100	
2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	49,415,100	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	49,415,100	
2	17	01	1.03	02	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	10 Dokumen	39,100,000	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	10 Dokumen	39,100,000	
2	17	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 laporan	5,315,100	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 laporan	5,315,100	
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 laporan	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 laporan	5,000,000	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	317,060,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	317,060,000	
2	17	01	1.05	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Padang	60 paket	90,000,000	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Padang	60 paket	90,000,000	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Padang	93 orang	227,060,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Padang	93 orang	227,060,000	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,279,288,055	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,279,288,055	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Padang	31 paket	62,358,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Padang	31 paket	62,358,200	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Padang	3 paket	89,828,400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Padang	3 paket	89,828,400	
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Padang	2 paket	353,446,400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Padang	2 paket	353,446,400	

2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	7 paket	211,658,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	7 paket	211,658,600	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Padang	3 paket	20,400,100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Padang	3 paket	20,400,100	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang	4 dokumen	5,880,000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang	4 dokumen	5,880,000	
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber, dan luar sumbar	100 laporan	530,716,355	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumber, dan luar sumbar	100 laporan	530,716,355	
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	20 dokumen	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	20 dokumen	5,000,000	
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	1,397,233,400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	1,397,233,400	
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Padang	1 unit	335,431,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Padang	1 unit	335,431,000	
2	17	01	1.07	03	Pengadaan Alat besar	Jumlah alat besar yang disediakan	Padang	1 unit	-	Pengadaan Alat besar	Jumlah alat besar yang disediakan	Padang	1 unit	-	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Padang	3 paket	515,675,200	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Padang	3 paket	515,675,200	
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang	11 unit	546,127,200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang	11 unit	546,127,200	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2,205,445,075	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2,205,445,075	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	10 laporan	2,332,383	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	10 laporan	2,332,383	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Padang	12 laporan	452,681,600	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Padang	12 laporan	452,681,600	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Padang	12 laporan	1,750,431,092	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Padang	12 laporan	1,750,431,092	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik		100%	920,133,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik		100%	920,133,000	

2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang	12 unit	130,890,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang	12 unit	130,890,000	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Padang	67 unit	98,350,000	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Padang	67 unit	98,350,000	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	4 unit	662,303,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	4 unit	662,303,000	
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	1 unit	21,400,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	1 unit	21,400,000	
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	1 unit	7,190,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	1 unit	7,190,000	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam		3.25%	70,469,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam		3.25%	70,469,000	
2	17	02	1.01		Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan		6 koperasi	70,469,000	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan		6 koperasi	70,469,000	
2	17	02	1.01	01	Fasilitas izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	sumatera barat	20 koperasi	70,469,000	Fasilitas izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	sumatera barat	20 koperasi	70,469,000	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan		65%	351,147,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan		65%	351,147,000	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel			251,147,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel			251,147,000	
2	17	03	1.01	03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Provinsi, 19 kab/kota	14 unit usaha	251,147,000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Provinsi, 19 kab/kota	14 unit usaha	251,147,000	

2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang menindaklanjuti hasil pengawasan		100,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang menindaklanjuti hasil pengawasan		100,000,000		
2	17	03	1.02	02	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Provinsi, 19 kab/kota	10 unit usaha	100,000,000	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Provinsi, 19 kab/kota	10 unit usaha	100,000,000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		43 unit	331,905,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		43 unit	331,905,000
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat			331,905,000	Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat			331,905,000
2	17	04	1.01	03	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Provinsi, 19 kab/kota	45 unit usaha	331,905,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Provinsi, 19 kab/kota	45 unit usaha	331,905,000
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern		80 koperasi	1,778,695,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern		80 koperasi	1,778,695,000
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan		150 koperasi	1,778,695,000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan		150 koperasi	1,778,695,000
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	semua kab/kota	25 unit usaha	909,452,000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	semua kab/kota	25 unit usaha	909,452,000

2	17	06	1.01	09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Provinsi, 19 kab/kota	150 unit usaha	869,243,000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Provinsi, 19 kab/kota	150 unit usaha	869,243,000	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang ferstandarisasi		125 produk	8,726,488,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang ferstandarisasi		125 produk	8,726,488,000	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			8,726,488,000	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			8,726,488,000	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	semua kab/kota serta luar provinsi	3000 unit usaha	6,017,733,100	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	semua kab/kota serta luar provinsi	3000 unit usaha	6,017,733,100	
					Pemulihan Usaha-usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang difasilitasi permodalan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga perbankan	semua kab/kota serta luar provinsi	500 unit usaha	400,000,000	Pemulihan Usaha-usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang difasilitasi permodalan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga perbankan	semua kab/kota serta luar provinsi	500 unit usaha	400,000,000	
2	17	07	1.01	05	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	semua kab/kota serta luar provinsi	1000 unit usaha	696,143,800	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	semua kab/kota serta luar provinsi	1000 unit usaha	696,143,800	
2	17	07	1.01	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	semua kab/kota	1330 unit usaha	1,150,000,000	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	semua kab/kota	1330 unit usaha	1,150,000,000	

2	17	07	3.02	01	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	semua kab/kota a serta luar provinsi	1 Perda	250,000,000	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	semua kab/kota a serta luar provinsi	1 Perda	250,000,000	
2	17	07	3.03	01	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	semua kab/kota a serta luar provinsi	150 UMKM	212,611,100	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	semua kab/kota a serta luar provinsi	150 UMKM	212,611,100	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha			7,409,233,300	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha			7,409,233,300	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			7,409,233,300	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			7,409,233,300	
2	17	08	1.01	03	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	semua kab/kota a	290 Unit usaha	2,700,000,000	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	semua kab/kota	290 Unit usaha	2,700,000,000	
2	17	08	1.01	04	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	semua kab/kota a serta luar provinsi	50 lembaga	913,553,800	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	semua kab/kota a serta luar provinsi	50 lembaga	913,553,800	
2	17	08	1.01	05	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	semua kab/kota a serta luar provinsi	1450 orang	2,879,699,500	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	semua kab/kota a serta luar provinsi	1450 orang	2,879,699,500	
2	17	08	3.02	01	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	semua kab/kota a serta luar provinsi	600 umkm	915,980,000	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	semua kab/kota a serta luar provinsi	600 umkm	915,980,000	

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7,652,678,951	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7,652,678,951		
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7,652,678,951	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7,652,678,951		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	127,981,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	127,981,300
2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	75,391,300	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	75,391,300
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	1 paket	18,640,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	1 paket	18,640,200
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	20 paket	56,751,100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	20 paket	56,751,100
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik		100%	52,590,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik		100%	52,590,000
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	69 unit	52,590,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	69 unit	52,590,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1500 orang	3,250,469,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1500 orang	3,250,469,000
2	17	05	1.01		Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya			3,250,469,000	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya			3,250,469,000
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	UPTD BALATKOP	1322 orang	3,250,469,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	UPTD BALATKOP	1322 orang	3,250,469,000
0	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		1833 orang	3,808,870,051	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		1833 orang	3,808,870,051

2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			3,808,870,051	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			3,808,870,051	
2	17	07	1.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	UPTD BALATK OP	1428 orang	3,808,870,051	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	UPTD BALATKOP	1428 orang	3,808,870,051	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		3,5%	465,358,600	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		3,5%	465,358,600	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			465,358,600	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			465,358,600	
2	17	08	1.01	02	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	UPTD BALATK OP	400 orang	465,358,600	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	UPTD BALATKOP	400 orang	465,358,600	

2.5. Review Usulan Kabupaten/Kota

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja OPD adalah usulan kabupaten/kota yang disampaikan dalam Rapat Sinkronisasi SKPD terkait, Forum OPD dan Forum Musrenbang Provinsi. Untuk itu Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir usulan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota yang disepakati bersama dalam forum OPD sesuai dengan target kinerja Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam draft RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan anggaran yang telah dianggarkan untuk tahun 2025.

Tabel. 2.5.1

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta desain Teknologi	Kota Pariaman	Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM (orang)	100 orang	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
2	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kota Payakumbuh	Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikasi halal dan sertifikasi merk	25 UMKM	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kab. Sijunjung	Jumlah entrepreneur milenial yang dilatih digital marketing	60 UMKM	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia
4	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Kab. Padang Pariaman	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	68 orang	Usulan diterima dan target disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

Dari tabel diatas dapat kami sampaikan bahwa usulan tersebut merupakan usulan dari kabupaten/kota yang dibahas dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Beberapa usulan dapat diakomodir karena usulan tersebut memang dalam rangka pencapaian program-program unggulan kepala daerah.

Disamping itu usulan yang diajukan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya nantinya akan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Namun apabila memungkinkan diharapkan Kabupaten/Kota juga dapat mengalokasikan melalui DAK Non Fisik yang setiap tahunnya dialokasikan di seluruh kabupaten/kota.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkannya melalui Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat kabupaten/kota sampai tingkat provinsi, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.

Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaiannya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2018, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat maupun terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/4627/ST tanggal 18 Agustus 2015 yang menyebutkan adanya ketentuan bahwa yang menerima hibah harus berbadan hukum, maka apabila ada usulan kegiatan dari masyarakat atau instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan bantuan sarana, parasana dan

modal, maka Dinas Koperasi,UKM Provinsi Sumatera Barat belum bisa memenuhinya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN 2025 – 2029, yang merupakan tahapan awal dari RPJPN 2025 -2029. Sasaran pembangunan jangka menengah 2025 – 2029 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025, yakni “Indonesia yang maju dan mandiri, adil, dan demokratis serta aman dan Bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, misi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 dijabarkan menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah.

Kementerian Koperasi dan UKM RI mempunyai visi “ Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong melalui peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan dalam Mendukung Perekonomian Nasional” , dengan misi yang akan dicapai adalah “Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Peran Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan dalam Mendukung Perekonomian Nasional”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka focus dalam pemberdayaan pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar kerangka penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan dan berkelanjutan. Untuk itu, tujuan diarahkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan modern
2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha naik kelas yang mampu berdaya saing di Pasar Domestik dan Global

3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang professional dan berkinerja tinggi, dengan hasil meningkatnya tata Kelola birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Tahun ke-4 Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu "Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera", dengan indikator tujuan adalah :

1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi
2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM, dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase peningkatan nilai asset koperasi
 - b) Persentase peningkatan volume usaha koperasi
 - c) Persentase koperasi RAT
 - d) Jumlah UKM yang bermitra
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka dapat digambarkan target tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

Renja Tahun 2025		
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Tujuan : Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi 2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	2,28 4,5
Sasaran : Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	1. Persentase peningkatan nilai asset koperasi 2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi 3. Persentase koperasi RAT 4. Jumlah UKM yang bermitra	5,15 2,28 70,13 5
Tujuan : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	A (82) 90
Sasaran : 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	A (82) 90

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, UKM Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026

3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Rencana Program tersebut terdiri atas 8 (delapan) program urusan koperasi dan UMKM dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan rincian program pada tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan indikator yang dicapai oleh program ini adalah persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator yang dicapai oleh program ini adalah persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam.
- 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator yang dicapai oleh program ini adalah persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan.
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah koperasi sehat.
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah jumlah SDM KUKM yang dilatih.
- 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah koperasi modern.

- 7) Program Pemberdayaan UMKM, dengan indikator yang dicapai oleh program ini adalah jumlah produk UMKM yang terstandarisasi, Rencana program tersebut didukung oleh 19 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 41.501.329.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi, UKM Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
- 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengurus izin usha simpan pinjam sehingga pelayanan kepada anggota menjadi lebih baik
Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi.
- 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengelola koperasi sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku.
Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase koperasi yang menndaklanjuti rekomendasi pengawasan
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan cukup sehat
Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi sehat.
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Sasaran dari pogram ini meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sehingga koperasi dapat dikelola secara baik dan UMKM dapat meningkatkan daya saing.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil yang dilatih.

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran dari program ini memberdayakan usaha koperasi sehingga koperasi dapat berkembang baik dari segi kelembagaan maupun dari segi usaha koperasi..

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi modern.

7) Program Pemberdayaan UMKM

Sasaran dari program ini memberdayakan UMKM sehingga UMKM memiliki daya saing dan meningkat usahanya .

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah produk UKM yang terstandarisasi.

8) Program Pengembangan UMKM

Sasaran dari program ini meningkatkan usaha UMKM sehingga UMKM naik kelas dan memiliki mitra usaha .

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PENUNJANG URUSAN	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	7 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	8 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	17 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	18 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	19 Penatausahaan Arsip Dinamis
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	20 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	21 Pengadaan Mebel
	22 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	24 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	26 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	27 Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya
	28 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
	29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
	30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
B	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
I	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	1 Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
C	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
I	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi
	1 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
II	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
D	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
I	Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi
	1 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI
I	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha
	2 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
I	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku
1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan
2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas serta Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
3	Pemulihan Usaha-usaha Kecil
4	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
5	Fasilitasi Sertifikat dan Standarisasi Usaha
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
I	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
2	Pengembangan Usaha Kecil
3	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
4	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
H	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
I	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan **RENJA 2025**

Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 8 Program, 16 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4.2.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025			RENCANA TAHUN 2026						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				41,501,329,000			45,651,461,900				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				41,501,329,000	-		45,651,461,900				
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	15,180,712,749		100%	16,698,784,024		
2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		100%	261,972,700		100%	288,169,970	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	6 dokumen	114,522,600	Padang	6 dokumen	125,974,860
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	3 laporan	79,166,400	Padang	3 dokumen	87,083,040
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	4 dokumen	68,283,700	Padang	4 dokumen	75,112,070

RENJA 2025

2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	8,750,165,419		100%	9,625,181,961
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	65 orang/bulan	8,409,891,719	Padang	65 orang	9,250,880,891
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang	2 dokumen	318,427,600	Padang	2 dokumen	350,270,360
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan,Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Padang	13 laporan	21,846,100	Padang	13 dokumen	24,030,710
2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	49,415,100		100%	54,356,610
2	17	01	1.03	02	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang	16 Dokumen	39,100,000	Padang	15 unit	43,010,000
2	17	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 laporan	5,315,100	Padang	2 laporan	5,846,610
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang	2 laporan	5,000,000	Padang	2 laporan	5,500,000
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	317,060,000		100%	348,766,000
2	17	01	1.05	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Padang	60 paket	90,000,000	Padang	60 paket	99,000,000
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Padang	93 orang	227,060,000	Padang	93 orang	249,766,000

2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,279,288,055		100%	1,407,216,861
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Padang	31 paket	62,358,200	Padang	31 paket	68,594,020
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Padang	3 paket	89,828,400	Padang	3 paket	98,811,240
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Padang	3 paket	353,446,400	Padang	2 paket	388,791,040
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	7 paket	211,658,600	Padang	7 paket	232,824,460
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Padang	3 paket	20,400,100	Padang	3 paket	22,440,110
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang	4 dokumen	5,880,000	Padang	4 dokumen	6,468,000
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumbar, dan luar sumbar	100 laporan	530,716,355	Sumbar, dan luar sumbar	100 laporan	583,787,991
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang	20 dokumen	5,000,000	Padang	20 dokumen	5,500,000
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	1,397,233,400		100%	1,536,956,740
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Padang	1 unit	335,431,000	Padang	1 unit	368,974,100
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Padang	12 paket	515,675,200	Padang	3 paket	567,242,720
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang	36 unit	546,127,200	Padang	11 unit	600,739,920

2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2,205,445,075		100%	2,425,989,583
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang	10 laporan	2,332,383	Padang	10 laporan	2,565,621
2	17	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Padang	1 laporan	452,681,600	Padang	12 laporan	497,949,760
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Padang	38 laporan	1,750,431,092	Padang	12 laporan	1,925,474,201
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik		100%	920,133,000		100%	1,012,146,300
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang	12 unit	130,890,000	Padang	12 unit	143,979,000
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Padang	108 unit	98,350,000	Padang	67 unit	108,185,000
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	4 unit	662,303,000	Padang	4 unit	728,533,300
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	1 unit	21,400,000	Padang	1 unit	23,540,000
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	1 unit	7,190,000	Padang	1 unit	7,909,000
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam		3.25%	70,469,000		3.95%	77,515,900

2	17	02	1.01		Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan		6 koperasi	70,469,000			77,515,900
2	17	02	1.01	01	Fasilitas izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	sumatera barat	20 unit usaha	70,469,000	sumatera barat	20 koperasi	77,515,900
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan		65%	351,147,000		67%	386,261,700
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel			251,147,000			276,261,700
2	17	03	1.01	03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Provinsi, 19 kab/kota	14 unit usaha	251,147,000	Provinsi, 19 kab/kota	14 unit usaha	276,261,700
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang menindaklanjuti hasil pengawasan			100,000,000			110,000,000
2	17	03	1.02	02	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Provinsi, 19 kab/kota	10 unit usaha	100,000,000	Provinsi, 19 kab/kota	10 unit usaha	110,000,000
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		43 unit	331,905,000		43 unit	365,095,500

2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan			331,905,000			365,095,500
2	17	04	1.01	03	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Provinsi, 19 kab/kota	45 unit usaha	331,905,000	Provinsi, 19 kab/kota	45 unit usaha	365,095,500
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern		80 koperasi	1,778,695,000		70 koperasi	1,956,564,500
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan		150 koperasi	1,778,695,000			1,956,564,500
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	semua kab/kota	25 unit usaha	909,452,000	semua kab/kota	25 unit usaha	1,000,397,200
2	17	06	1.01	09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Provinsi, 19 kab/kota	300 unit usaha	869,243,000	Provinsi, 19 kab/kota	150 unit usaha	956,167,300
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		130 produk	8,726,488,000		130 produk	9,599,136,800
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			8,726,488,000			9,599,136,800

2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	semua kab/kota serta luar provinsi	3150 unit usaha	6,230,344,200	semua kab/kota serta luar provinsi	3000 unit usaha	6,853,378,620
					Pemulihan Usaha-usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	semua kab/kota serta luar provinsi	500 unit usaha	650,000,000	semua kab/kota serta luar provinsi	500 unit usaha	715,000,000
2	17	07	1.01	05	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	semua kab/kota serta luar provinsi	1000 unit usaha	696,143,800	semua kab/kota serta luar provinsi	1000 unit usaha	765,758,180
2	17	07	1.01	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	semua kab/kota	1330 unit usaha	1,150,000,000	semua kab/kota	1330 unit usaha	1,265,000,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha			7,409,233,300		4,2%	8,150,156,630
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			7,409,233,300			8,150,156,630
2	17	08	1.01	03	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	semua kab/kota	290 Unit usaha	2,700,000,000	semua kab/kota	290 Unit usaha	2,970,000,000

2	17	08	1.01	04	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	semua kab/kota serta luar provinsi	650 lembaga	1,829,533,800	semua kab/kota serta luar provinsi	50 lembaga	2,012,487,180
2	17	08	1.01	05	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	semua kab/kota serta luar provinsi	1450 orang	2,879,699,500	semua kab/kota serta luar provinsi	1450 orang	3,167,669,450
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7,652,678,951			8,417,946,846
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7,652,678,951			8,417,946,846
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	127,981,300	-		140,779,430
2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	75,391,300		1	82,930,430
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	1 paket	18,640,200	Padang	1 paket	20,504,220
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang	2 paket	56,751,100	Padang	20 paket	62,426,210
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik		100%	52,590,000		100%	57,849,000
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang	69 unit	52,590,000	Padang	69 unit	57,849,000

2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah UMKMyang dilatih		1650 orang	3,250,469,000		1800 orang	3,575,515,900
2	17	05	1.01		Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				3,250,469,000			3,575,515,900
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	UPTD BALATKOP	1382 orang	3,250,469,000	UPTD BALATKOP	1322 orang	3,575,515,900
0	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		130 buah	3,808,870,051		125 produk	4,189,757,056
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku				3,808,870,051			4,189,757,056
2	17	07	1.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	UPTD BALATKOP	1428 orang	3,808,870,051	UPTD BALATKOP	1428 orang	4,189,757,056
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		3,5%	465,358,600		3,5%	511,894,460
2	17	08	1.01		PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			465,358,600			511,894,460
2	17	08	1.01	02	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	UPTD BALATKOP	400 orang	465,358,600	UPTD BALATKOP	400 orang	511,894,460
TOTAL									41,501,329,000	-	-	45,651,461,900

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Sumatera Barat Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan dalam kerangka penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.